

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 208 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 127 TAHUN 2022  
TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI  
BIROKRASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pembaruan daftar Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap daftar nama Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 127 Tahun 2022 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/TPA Tahun 2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 127 TAHUN 2022 TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 127 Tahun 2022 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2022  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan Yth.:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,

  
Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH NOMOR 127 TAHUN 2022  
TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI  
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 208 TAHUN 2022

TANGGAL : 13 Oktober 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Nama/Jabatan</b>	<b>Unit Organisasi</b>
Penanggung Jawab	Kepala LKPP	LKPP
Ketua	Inspektur	Inspektorat
Anggota	1 Mochammad Andhika Rangga Lazuardi	Biro Perencanaan dan Keuangan
	2 Mhd. Irsan Nasution	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
	3 Nicke Kusuma Devi	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
	4 Estu Retno Yulianti	Inspektorat

<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Nama/Jabatan</b>	<b>Unit Organisasi</b>
5	Rizky Arimawati	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaaan Barang/Jasa
6	Deasy Rachmawati	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaaan Umum
7	Firmansyah	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaaan Khusus
8	Sri Aditya Nur Pratama	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
9	Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaaan
10	Andri Priyo Utomo	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
11	Sugianto	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaaan Secara Elektronik
12	Anatasia	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
13	Umi Nurnaeni	Direktorat Sertifikasi Profesi

<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Nama/Jabatan</b>	<b>Unit Organisasi</b>
14	Sari Melani	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
15	Imam Arumsyah	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
16	Mira Erviana	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI